



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS TADULAKO

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DAMRY H.B**
2. Jabatan : **DEKAN**
3. NHK : **1000156**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 745.000.000

1. Tanah Seluas 220 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
2. Tanah Seluas 794 m2 di KAB / KOTA SIGI, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 427.000.000

1. MOTOR, YAMAHA BJ8 W A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOTOR, YAMAHA BKU A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
3. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 158.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 304.005.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.634.005.000

**III. HUTANG**

Rp. 170.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.464.005.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.